

Ini Kata Guru Besar HI UMY Soal Dampak Hubungan Internasional Indonesia Australia Pasca Penghinaan Terhadap Pancasila

Senin, 09-01-2017

MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANTUL – Isu pelecehan Pancasila yang dilakukan oleh Militer Australia berawal saat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mengadakan latihan bersama. Seorang instruktur bahasa dari Kopassus menemukan materi pelatihan yang dinilai menghina Indonesia. Hal itu berlanjut pada reaksi TNI yang menghentikan sementara kerja sama militer dengan militer Negeri Kangguru itu.

Prof. Tulus Warsito, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengatakan, dalam melihat permasalahan tersebut kita harus mulai melihat dari hubungan Australia dan Indonesia yang memiliki hubungan sangat dekat, baik dari segi geografis, maupun kedekatan ekonomi.

“Australia dan Indonesia merupakan dua negara yang dapat dikatakan berdempetan. Dalam konteks itu, maka dinamika konfliknya akan paling sering terjadi. Sama saja seperti hubungan antar tetangga di masyarakat pada umumnya, permasalahan pasti ada saja terjadi,” ujar Tulus, ketika ditemui redaksi Muhammadiyah.or.id, Senin (9/1) di Gedung Pascasarjana UMY.

Selain itu, diluar dari hal penghinaan pancasila yang dilakukan oleh Militer Australia, Tulus mengatakan hubungan Australia dengan Indonesia dalam hal ekonomi cukup tinggi. “Nilainya hingga mencapai 750 juta dolar pertahun, dan banyak produksi Indonesia yang di impor ke Australia setiap tahunnya,” ujarnya.

Sehingga, jika terjadi konflik yang berkepanjangan dari permasalahan tersebut, Tulus menilai kerugian yang ditimbulkan bagi kedua negara akan lebih besar. “Hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Militer Australia, dalam artian terlalu konyol mereka menghina Pancasila, karena jika sampai terjadi konflik, kerugian yang ditimbulkan akan lebih besar dari masalah yang ada sekarang,” terang Tulus.

Lanjut Tulus, perlu diketahui pula bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia saat itu mendapatkan dukungan cukup besar dari Australia. “Australia merupakan penyokong utama dalam kemerdekaan Indonesia saat itu, meskipun demikian, kita tidak bisa semena-mena tunduk dengan kesalahan yang telah dilakukan mereka (red Militer Australia),” ujar Tulus.

Tulus juga berpesan agar pemerintah Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari permasalahan yang ada saat ini. “Pemerintah harus belajar dari permasalahan ini, khususnya dalam hal hubungan kerjasama luar negeri,” tutupnya. **(adam)**

Redaktur : Dzar